BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) adalah bantuan yang diberikan pemerintah Indonesia menyambut kenaikan harga Bahan Bahan Minyak (BBM) yang terjadi pada 22 Juni 2013. Sebagai akibat dari kenaikan harga BBM, maka pemerintah mengadakan bantuan untuk rakyat Indonesia, yaitu BLSM. Pemerintah Indonesia meyakini tindakan ini adalah penting untuk menyelamatkan fiskal negara, meskipun pemerintah juga meyakini bahwa ini adalah keputusan yang sulit bagi pemerintah. Dalam rapat dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR), telah disepakati total dana ganti rugi kenaikan BBM bersubsidi sebesar 27,9 triliun rupiah. Walaupun begitu, BLSM sering disebut masyarakat sebagai kelanjutan dari Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Harga BBM yang saat ini telah mengalami kenaikan, tentunya akan berdampak pada inflasi. Maka untuk mengendalikan inflasi akibat kenaikan harga BBM, dilakukanlah koordinasi dengan Bank Indonesia yang kemudian menyesuaikan tingkat suku bunga, sedangkan untuk menjaga daya beli masyarakat dijalankan program BLSM itu sendiri. BLSM itu sendiri diberlakukan selain untuk menjaga daya beli masyarakat, juga agar masyarakat dapat melakukan penyesuaian dan kedepannya ada program pemberdayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Raskin, beasiswa siswa miskin, pembangunan irigasi, pembangunan air bersih dan sarana-sarana lainnya bagi masyarakat. Pemerintah bekerja sama dengan PT Pos Indonesia untuk menyalurkan dana BLSM. BLSM sejatinya merupakan bantuan sementara yang diberikan kepada masyarakat miskin yang diberikan selama empat tahap dengan nominal Rp150.000,00 per satu tahapan pembagian selama empat bulan kedepan. Pencairan pertama dapat di ambil mayarakat yang terdaftar sebagai penerima BLSM dapat diambil di bulan Juli dan dirapelkan dengan bulan Agustus, sehingga dalam pembagian BLSM tahap I dan II disatukan dengan nominal sebesar

Rp300.000,00. Syarat pengambilan BLSM adalah Kartu Perlindungan Sosial (KPS), Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). KPS dapat diambil sampai Desember akhir tahun ini. BLSM ini merupakan salah satu tindakan yang diambil pemerintah untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang membutuhkan di Indonesia.

Begitu banyak pro dan kontra yang muncul atas kebijakan yang diambil pemerintah dalam membantu masyarakat yang kurang mampu di Indonesia. Tingkat kesejahteraan di negara kita dianggap masih sangat kurang dikarenakan masih begitu banyak masyarakat yang memiliki kehidupan kurang layak yang diakibatkan oleh beberapa faktor seperti pengangguran, kelaparan dan kemiskinan. Hal tersebut menjadi yang paling sering dibahas dalam ruang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengingat tentang bagaimana mencari solusi untuk mengatasinya. Dari hasil yang dibicarakan oleh pemerintah kita maka diambil sebuah keputusan mengenai subsidi yang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Dengan harapan dapat membangun semangat untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik kedepannya.

Mekanisme pembayaran BLSM 2013 untuk tahap kedua yaitu masyarakat membawa KPS dan kartu identitas yang masih berlaku dan datang ke kantor-kantor bayar yang sudah ditentukan. Pembayaran setiap tahap diperlakukan secara terpisah. Apabila ada pemegang Kartu Perlindungan Sosial yang tidak mencairkan pembayaran tahap pertama di lokasi yang ditetapkan, masih dapat mengambil pada tahap kedua. Apabila tidak tercatat dalam Daftar Nominasi di lokasi kantor bayar terdekat, pemegang Kartu Perlindungan Sosial dapat dieskalasikan ke Kantor Pos untuk mendapat ijin pembayaran. Pemegang Kartu Perlindungan Sosial tidak diperbolehkan mencairkan di lokasi selain Kantor Bayar yang ditetapkan. Penerima datang ke kantor pos dengan membawa Kartu Perlindungan Sosial dan identitas seperti KTP, langsung dananya dapat kami bayarkan. Kami ingatkan pula bahwa KPS juga berfungsi untuk penerimaan bantuan pemerintah lainnya seperti Raskin dan Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Tetapi faktanya pembagian BLSM ini dinilai tidak merata. Banyaknya warga yang seharusnya mendapatkan kompensasi dari pemerintah justru tidak dapat menikmati. Sementara itu, warga yang seharusnya tidak menikmati kompensasi itu justru dapat menikmatinya. Sama halnya dengan yang terjadi di desa Cibeureum Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung. Pembagian BLSM di Desa Cibereum Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung yang di bagikan pada tanggal 20 Juli 2013 lalu menunjukan bahwa apa yang terjadi di masa BLT sedikit banyak tidak terbukti. Mayoritas warga penerima BLSM merupakan buruh tani di Cibereum, maka tidak mengagetkan jika penerima dana BLSM di Desa Cibereum berjumlah 2.075 orang dengan jumlah penduduk sebanyak 15.576 jiwa. Sesuai jadwal, pembagian BLSM di Desa Cibereum dimulai pukul 10.00 WIB, akan tetapi molor hingga pukul 12.00 WIB. Hal ini dikarenakan pihak dari PT Pos Indonesia selaku pihak yang mempunyai kewenangan untuk mendistribusikan BLSM telat datang. Akan tetapi sebelum perwakilan dari PT Pos Indonesia tiba, aparatur desa dibuat kewalahan oleh warga yang mengurus administrasi untuk kelengkapan pencairan dana BLSM tersebut. Melihat fakta dilapangan, masih ada masyarakat yang datang menerima BLSM itu dengan memakai perhiasan seperti gelang, kalung, cincin dan itu mungkin terbuat dari emas. Dari hal itu saja sudah terlihat bahwa pembagian BLSM yang dilaksanakan di Desa Cibeureum Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung belum merata dan belum tepat sasaran.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Adapun maksud dari laporan penulisan ini diantaranya:

1. Laporan ini yaitu untuk menjadi bahan untuk menambah referensi pengetahuan pembaca mengenai masalah-masalah yang terjadi terhadap pembagian dana BLSM;
2. Memberi informasi mengenai proses tata cara pembagian dana BLSM di Desa Cibereum Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung;

3. Memberi informasi kepada pembaca mengenai kelemahan dan kelebihan program BLSM yang terjadi di masyarakat.

1.2.2 Tujuan

Laporan mengenai pembagian dana BLSM ini mempunyai tujuan diantaranya yaitu:

1. Kepada Pemerintah: laporan ini bertujuan untuk melaporkan bagaimana tindakan aparatur pemerintah desa dan tata cara pembagian dalam program BLSM di Desa Cibereum Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung pada tanggal 20 Juli 2013 lalu.
2. Kepada Jurusan Ilmu Pemerintahan UNIKOM: laporan ini bertujuan untuk melaporkan apa saja yang terjadi di lapangan dan juga sebagai laporan akhir dalam kelengkapan nilai KKL-PPM Ilmu Pemerintahan UNIKOM.
3. Kepada Masyarakat Cibereum: laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat Cibereum bagaimana seharusnya pembagian dan pelayanan publik dalam rangka pembagian BLSM di Desa Cibereum dilakukan.
4. Kepada pribadi penulis: laporan ini sebagai bahan kajian kelak untuk mengadakan penelitian langsung dan sebagai data perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya dengan topik pembahasan BLSM.